

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA MANDIRI DI DESA WANUREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah s<mark>atu syarat u</mark>ntuk m<mark>emperole</mark>h gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah



PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang", telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk pengumpulan data di lapangan dan dilanjutkan untuk menjadi skripsi, yang disusun oleh:

Nama: Hesty Pratiwi

NIM : 1201413057

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Joko Sutarto, M. Pd

NIP. 195609081983031003

Dosen Pembimbing II

Dr. Sungkowo Edi M, S.Pd. M.Si

NIP. 196807042005011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dr. Utsman M.Pd

NIP. 196705261995122001 -

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang" ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 September 2017

Panitia Ujian

Sekertaris

Dr. Tri Suminar, M.Pd

NIP. 196705261995122001

Penguji Utama

Dr. Achmad Rifai RC. M.Pd

NIP. 195908211984031001

UNIVERSITAS NEGERI SEMAR

Penguji I

r Sungkowo Edy M. S.Pd. M.Si

NIP. 196807042005011001

Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd

Penguji II

NIP. 195609081983031003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang " adalah hasil karya saya senidiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

September 2017

Yang Menyatakan

(Hesty Pratiwi)

UNIVERSITIAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Bukanlah Hidup Kalau Tidak Ada Masalah, Bukanlah Sukses
Kalau Tidak Ada Rintangan, Bukanlah Menang Kalau Tidak Dengan
Pertarungan, Bukanlah Lulus Kalau Tidak Ada Ujian, dan Bukanlah
Berhasil Kalau Tidak Berusaha.

PERSEMBAHAN:

- 1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya.
- 2. Orang tua saya, Bapak Jamil Suroyo dan Ibu Yuwati yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, pengorbanan dan doa.
- 3. Kakakku Ady Prasetyo yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pengorbanan dan kasih sayang.
 - 4. Teman-teman PLS Universitas Negeri Semarang 2013.
 - Keluarga kecilku selama diperantauan : Shima, Ruli,
 Evi, Bela, Bima, Tri, Nisa, Restu, dll
 - 6. Teman-teman Karang Taruna yang selalu memberikan semangat dan dukungan : Hendra, Deny, Zullya, dkk.
 - 7. Almamaterku.

ABSTRAK

Hesty Pratiwi. 2017. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang".

Skripsi, Jurusan Pendidikan Non Formal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Dosen Pembimbing Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd dan Dr. Sungkowo Edi Mulyono, S. Pd. M.Si

Kata kunci : desa wisata, pemberdayaan masyarakat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan pariwisata di pedesaan yang semakin digemari oleh wisatawan dengan berbagai keragaman seni dan budaya lokal. Desa Wisata Wanurejo adalah salah satu pengembangan pariwisata desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi: 1) Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui desa wisata mandiri, 2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui desa wisata mandiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 2 pengelola pariwisata desa, 2 tutor pelatihan, 6 peserta pelatihan, dan 2 masyarakat umum. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan 1) Reduksi data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini : 1) strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo dilaksanakan melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan blangkon dan pelatihan seni tari di Sanggar Avadana, strategi juga dilakukan dengan promosi yang di laksanakan melalui pagelaran rakyat atau yang dikenal dengan gelar budaya setiap tanggal 17 Mei yang juga diperingati sebagai hari jadi Desa Wanurejo, selain itu Desa Wanurejo juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang mendukung kegiatan pariwisata desa. 2) Faktor pendorong dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yaitu letak Desa Wanurejo yang srategis sebagai pintu gerbang masuknya Candi Borobudur, selain itu pelaku seni yang masih mempertahankan dan mengembangkan budaya dan seni tradisional serta didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan cukup tinggi. Selain itu beberapa faktor yang menghambat strategi pemberdayaan dalam desa wisata yaitu munculnya mafia pariwisata, semakin besarnya sifat egosentris yang muncul pada individu untuk memperoleh keuntungan sendiri, dan fasilitas pelaku wisata yang masih sangat terbatas.

Simpulan yang dapat diambil yaitu strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dilakukan melalui pelatihan, promosi dan kerjasama. Saran yang disampaikan: pemerintah, pengelola dan masyarakat lebih tanggap dan bijak dalam mengatasi permaslahan pariwisata untuk meningkatkan taraf ekonominya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan pahit dan manisnya kehidupan. Sungguh besar karunia dan nikmat tersebut, sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wista Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang" dapat terselesaikan. Penulisan skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultaas Ilmu Pendidikan Unniversitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Utsman, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Unniversitas Negeri Semarang.
- Ibu Dr. Tri Suminar, M.Pd selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang.
- 3. Bapak Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd selaku pembimbing 1, yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi untuk kesempurnaan skripsi.
- Bapak Dr. Sungkowo Edi Mulyono, S.Pd, M.Si selaku pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan berkonsultasi mengenai skripsi.

- Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang telah menginspirasikan segudang ilmu melalui pemikiran dan pengajaran.
- Segenap Karyawan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang terkhusus Bapak Purwanto yang telah melayani dan membantu dengan baik.
- 7. Ibu Dra Umi Aminah selaku Kepala Desa Wanurejo beserta perangkat desa dan masyarakat desa lainnya yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, fasilitas dan informasi dan data dari awal penelitian sampai selesai.
- 8. Bapak Bendrat Sulistyo, Bapak Ganang Tri Laksana selaku Ketua dan Wakil beserta Perangkat Organisasi Badan Pengelolaan Desa Wisata Wanurejo yang telah bersedia memberikan informasi kebijakan kepariwisataan.
- 9. Ibu Elisabet Pangesti selaku pemilik Sanggar Avadana yang mendukung dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
- 10. Kedua orangtua tercinta, Bapak Jamil Suroyo dan Ibu Yuwati serta saudaraku Mas Adi Prasetyo yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan moral dan semangat selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
- 11. Teman-teman Jurusan Penddidikan Luar Sekolah yang senasip dan seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian luar biasa dan selamat mengabdi kepada masyarakat.

12. Teman-teman Karang Taruna Sukmolego Dusun Ngentak yang selalu

memberi dukungan dan semangat di luar perkuliahan.

13. Seluruh teman dan sahabat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan

satu persatu, yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT, membalas semua jasa baik mereka, dan menjadikan

pemberat amal kebaikan di sisi-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan

dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima masukan dan saran

demi perbaikan skripsi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi memberikan manfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca maupun masyarakat pada umumnya.

Semarang,

September 2017

Penulis UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGI

Hesty Pratiwi

NIM: 1201413057

viii

DAFTAR ISI

HALAN	MAN JUDUL	
PERSE'	TUJUAN PEMBIMBING	j
PENGE	SAHAN	i
PERNY	ATAAN	ii
	O DAN PERSEMBAHAN	
	AK	
	PENGANTA <mark>R</mark>	
	R ISI	
DAFTA	R TAB <mark>E</mark> L	xii
	R GA <mark>MB</mark> AR	
DAFTA	R LA <mark>MPIRAN</mark>	
BAB I	PE <mark>NDAHULUAN</mark>	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Rumusan Masa <mark>lah</mark>	
1.3	Tujuan Peneliti <mark>an</mark>	
1.4	Manfaat Penelitian	
1.5	Penegasan Istilah	
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	14
2.1	Hakekat Pendidikan Nonformal Dalam Pemberdayaan	
	2.1.1 Pendidikan Sebagai Sarana Pemberdayaan	14
	2.1.2 Pengertian Pendidikan Nonformal	15
	2.1.3 Tujuan Pendidikan Nonformal	16
	2.1.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	17
	2.1.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	20
	2.1.6 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	22
	2.1.7 Kontribusi Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan	24
2.2	Pemberdayaan Desa Wisata	27
	2.2.1 Konsen Pemberdayaan Masyarakat Desa	27

	2.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat	. 30
	2.2.3 Pengembangan Desa Wisata	. 34
	2.2.4 Definisi Desa Wisata	. 37
	2.2.5 Pemberdayaan Desa Wisata	. 40
2.3	Penelitian Yang Relevan	. 43
2.4	Kerangka Berfikir	. 44
BAB III	METODE PENELITIAN	. 47
3.1	Pendekatan Penelitian	
3.2	Lokasi Penelitian	. 48
3.3	Subjek Penelitian	
3.4	Fokus Penelitian	
3.5	Sumber dan Jenis Data	. 50
3.6	Metode Pengumpulan Data	. 52
3.7	Keabsahan Data	
3.8	Metode Analisis Data	. 59
BAB IV	HASIL PENE <mark>LITIAN D</mark> AN <mark>PEMB</mark> AHASAN	. 61
4.1	HASIL PENE <mark>LITIAN</mark>	. 61
	4.1.1 Gambara <mark>n U</mark> mum Lokasi Perelit <mark>ian</mark>	. 61
	4.1.1.1 Kondisi Geografis	. 61
	4.1.1.2 Kondisi Demografi	. 63
	4.1.2 Gambaran Umum Desa Wisata Wanurejo	. 66
	4.1.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam	. 66
	4.1.2.2 Dinamika Kehidupan	. 67
	4.1.2.2.1 Status Kepemilikan Tanah	. 67
	4.1.2.1.2 Sarana Prasarana	. 68
	4.1.2.2.3 Budaya dan Alam	. 69
	4.1.2.2.4 Kalender Musim	. 71
	4.1.2.2.5 Dampak Modernisasi	. 72
	4.1.2.3 Latar Belakang Terbentuknya Desa Wisata Wanurejo	. 73
	4.1.2.4 Visi dan Misi Desa Wisata Wanurejo	. 75
	4.1.2.5 Tahapan Pengembangan Desa Wisata Wanurejo	75

4.1.2.6 Potensi dan Daya Tarik Objek Wisata	79
4.1.2.7 Bentuk Kegiatan Pemberdayaan di Desa Wisata	83
4.1.2.8 Rencana Pengembangan Kawasan Desa Wisata	85
4.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Wanui	rejo. 86
4.1.3.1 Pelatihan	88
4.1.3.2 Promosi	93
4.1.3.3 Menjalin Kerjasama	96
4.1.4 Faktor Pendorong dan Penghambat	97
4.2 PEMBAHASAN	9 9
4.2.1 Strat <mark>eg</mark> i <mark>Pemb</mark> erdayaan Masya <mark>rakat</mark> M <mark>el</mark> alui Desa Wisata	99
4.2.1.1 Pelatihan	104
4. <mark>2.1.</mark> 2 Promosi	1088
4. <mark>2.1.3 Kerjasama</mark>	1099
4.2. <mark>2 Faktor Pendorong da</mark> n F <mark>aktor</mark>	1133
4.1.11.1 Faktor Pendorong	1144
4.1.11.2 Fa <mark>kto</mark> r <mark>Pengha</mark> mbat	1144
BAB V PENUTUP	1155
5.1 Simpulan	1155
5.2 Saran	1166
DAFTAR PUSTAKA	1188
LAMDIDAN	1221

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

	Halamar
4.1 Bagian Wilayah Desa Wanurejo	6
4.2 Jumlah Penduduk	64
4.3 Jumlah Penduduk Berdasaekan Struktur Pendidikan	66
4.4 Penggunaan Lahan Kering Eksisting Desa Wanurejo	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	45
Gambar 1. Balai Desa Wanurejo	198
Gambar 2. Peta Wisata Desa Wanurejo	198
Gambar 3. Potensi Desa Wanurejo	199
Gambar 4. Sanggar Tari Avadana	201
Gambar 5. Pelatihan Blangkon	202
Gambar 6. Pelatihan Homestay	203
Gambar 7. Pelatihan Guide Lokal	204
Gambar 8. Wawancara Wakil Bapardes	205
Gambar 9.Gelar Budaya Wanurejo	205
Gambar 10. Bangunan Homestay dan Hotel di Desa Wanurejo	206
Gambar 11. Wawancara Masyarakat Umum	

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kisi-kisi dan Pedoman Wawancara	123
Lampiran 2. Transrip Wawancara	128
Lampiran 3. Hasil Wawancara	135
Lampiran 4. Frekuensi kunjungan wisatawan	175
Lampiran 5. Paket Wi <mark>s</mark> ata <mark>D</mark> esa Wanurejo	177
Lampiran 6. Cat <mark>at</mark> an <mark>La</mark> pangan	182
Lampiran 7. Do <mark>kumentasi Pene</mark> liti <mark>an</mark>	197
Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian	207
Lampiran 9. Surat Balasan	208



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Karena terdiri dari beribu-ribu pulau maka indonesia juga dihuni oleh bermacam-macam ras, etnis, suku dan adat istiadat yang berbeda. Masing-masing daerah tersebut memiliki keunggulan sendiri-sendiri termasuk potensi alamnya. Hal ini tentu dapat menguntungkan dalam bidang kepariwisataan, karena dengan banyaknya potensi alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang akan menarik banyak wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara apabila pengelolaan dilakukan dengan baik. Seperti yang tertuang dalam UU RI No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhan 1945.

Pariwisata sering dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam ekonomi dunia. Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan mengaktifkan sektor produksi lain dari negara wisata

(Wahab, 1989. Hal: 5). Seperti halnya pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Dalam UU RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan pula bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Indonesia sendiri memang terkenal dengan potensi wisata yag beraneka ragam, mulai dari pantai yang indah, pegunungan yang hijau dan peninggalan-peninggalan sejarah yang sudah terkenal dan bahkan mendunia. Hal ini didukung dengan geologis indonesia yang terdiri dari kepulauan baik pulau besar dan pulau-pulau kecil disekitarnya dengan dikelilingi dua samudera terbesar didunia yaitu samudera hindia dan samudera pasifik sehingga mampu menciptakan gambaran alam yang mempesona. Selain itu indonesia juga dikenal dengan berbagai ragam budaya yang masih sangat kental yang menjadi warisan leluhur terdahulu secara turun temurun. Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata dengan memanfaatkan potensi budaya yang dimiliki sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara manapun.

Salah satu provinsi yang terkenal dalam industri pariwisata yaitu provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur dan memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 33,264 juta jiwa (proyeksi sensus penduduk 2010). Secara administratif, profinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 537 kecamatan serta 7809 desa dan 769 kelurahan. Dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 8578, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Dari sekian jumlah kabupaten di Jawa Tengah tersebut memiliki keragaman budaya yang beraneka macam dimana setiap daerah memiliki kebudayanya masing-masing yang menggambarkan ciri khas dari daerah tersebut.

Pemerintah juga telah mengeluarakan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan Pusat Daerah, sesuai dengan LINIVERSITAS NEGERESEMARANG prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI. pemerintah memberikan Artinya wewenang secara penuh kepada daerah/kabupaten untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas kemakmuran masyarakat di daerahnya. Dengan ini, diharapkan dapat memecahkan permasalahanpermasalahan yang sifatnya kedaerahan seperti kurangnya lapagan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah artinya pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang memuat kewenangan desa. Pelaksanaan kewenangan ya<mark>ng dimiliki oleh des</mark>a te<mark>rsebut diharapk</mark>an dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, yaitu mewujudkan otonomi desa agar desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri (Jamaludin, 2015:179). Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri, termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian, desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan politik. Meskipun demikian, otonomi yang dimiliki desa berdasarkan pada asal-usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Karena pada dasarnya otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan LINIVERSITAS NEGERESEMARANG mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Sebagai realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No 22 Tahun 1999) yaitu pembangunan desa wisata. Hal ini sebagai salah satu perwujudan peran serta pemerintah dalam memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan melalui pengembangan sektor pariwisata. Dasar hukum

pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tentang Pembangunan Kepariwisataan (Pasal 6 : Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia berwisata, Pasal 8 : 1). Bentuk kepedulian dan komitmen, serta peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 pengganti UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa dampak yang diakibatkan dari pengembangan kepariwisataan <mark>berupa peningkatan kesejahteraan masya</mark>rakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan.

Provinsi Jawa Tengah sendiri, hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani. Salah satunya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi jawa tengah tahun 2013-2018 adalah pengurangan kemiskinan. Mengingat jumlah penduduk miskin dipedesaan, maka penanggulangan kemiskinan di pedesaan perlu mendapatkan perhatian, dan penangan yang lebih konseptual, sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya melalui RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di pedesaan perlu dikembangkan konsep desa berdikari/desa mandiri. Desa berdikari adalah desa (beberapa desa) sebagai satu kesatuan kawasan yang terus-menerus mengembangkan kedaulatan dibidang politik, keberdikarian di bidang ekonomi, dan kepribadian dibidang sosial budaya, melalui pemberdayaan masyarakat yang dijiwai oleh semangat gotong royong dalam suatu rembug desa

demi perbaikan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan UU Desa No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Model desa berdikari mempunyai visi untuk membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno berdaulat dibidang politik, Berdikari dibidang ekonomi dan Berkepribadian di bidang kebudayaan. Dengan visi tersebut diharapkan Jawa Tengah mampu mewujudkan daerah yang sejahtera dengan kemandirian ekonomi dengan menonjolkan potensi yang ada dan budaya yang dimiliki dari tiap masing-masing daerah yang mencirikan daerahnya tersebut. Dengan demikian, daerah tersebut mampu menopang kesejahteraan masyarakatnya serta meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan). Karena pada dasarnya pemberdayaan adalah paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek yang prinsipiil dari manusia di lingkungannya, yaitu mulai dari LINDVERSITAS NEGERI SEMARANG aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai pada aspek manajerial (Jamaludin, 2002:242).

Desa Wanurejo yang menurut Gubernur Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai salah satu desa Berdikari atau desa mandiri yaitu salah satu desa yang terletak di Kabupaten Magelang tepatnya di Kecamatan Borobudur. Letaknya hanya sekitar 600 meter sebelah tenggara candi Borobudur, diantara lereng

pegunungan menoreh dan diapit oleh dua sungai besar yaitu sungai progo dan sileng. Selain letaknya yang sangat strategis di jalur wisata candi Borobudur, desa Wanurejo juga memiliki potensi alam yang subur dan hijau dengan bentangan sawah yang luas dengan latar belakang rangkaian pegunungan menoreh yang indah.

Desa Wanurejo juga memiliki budaya dan tradisi yang khas yang juga dapat berpotensi untuk disajikan dalam mendukung sektor industri pariwisata, seperti kesenian berupa seni tari jatilan, cerita rakyat dan atraksi pencak silat yang masih dilestar<mark>ikan dan menjadi</mark> atra<mark>ksi wisatawan. Se</mark>bagian besar mata pencaharian penduduk di Desa wanurejo selain sebagai petani, juga sebagai pengrajin berupa ukir bambu dan handicraf. Hal ini juga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Wanurejo. Karena letaknya yag berada di jalur wisata Candi Borobudur maka di Desa Wanurejo terdapat banyak homestay atau penginapan yang bernuansa alami pedesaan sehingga semakin menarik wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur. Dengan demikian, Desa Wanurejo menjadi ramai dengan wisatawan khususnya wisatawan asing yang tidak hanya menikmati nuansa alam pedesaan tetapi juga LIND/ERSITAS NEGERLSEMARANG berbagai keragaman budaya dan tradisi yang ada di desa Wanurejo. Melihat kondisi tersebut, tentu menjadi peluang besar untuk berkembangnya sektor pariwisata di Desa Wanurejo.

Dewasa ini para wisatawan mulai menggemari tempat wisata yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan alamnya saja tetapi lebih kepada interaksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, mulai dikembangkan wisata alternatif yang disebut desa wisata. Definisi dari desa wisata sendiri menurut UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah suatu daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata yang mengintgrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang disajikan dalam suatu stuktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat. Perdes No 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa kanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan desa wisata.

Seperti halnya di Desa Wisata Wanurejo, dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di mana setelah banyaknya ketertarikan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap nuansa alami pedesaan di sekitar wisata Candi Borobudur, tidak mungkin bahwasanya masyarakat hanya berdiam diri melihat wisatawan yang hilir mudik dengan melewatkan berbagai peluang besar disekitarnya dengan dukungan berbagai potensi yang ada untuk menarik wisatawan tersebut. Dengan demikian, masyarakat yang tadinya hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai petani,

namun sekarang banyak warga yang menawarkan kerajinan tangan seperti ukir bambu, patung miniatur dan handicraf seperti pensil gaul, blangkon, dll. Selain itu juga mulai banyak dikembangkan seni tradisional berupa seni tari klasik dan jathilan. Hal tersebut menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang dianggap telah mampu mengangkat potensi lokal ke kancah nasional dengan sistem pengelolaan dan strategi yang khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar, sehingga saya tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Wisata Wanurejo.

Dengan mempertimbangkan potensi, serangkaian aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui model desa wisata, maka saya tertarik untuk belajar dan melakukan penelitian tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan desa wisata merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa yang mengarah pada peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih mandiri. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini membahas rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Strategi apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?

1.2.2 Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Borobudur Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Borobudur Kabupaten Magelang ?
- 1.2.3 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Borobudur Kabupaten Magelang?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri yang ada di Desa Wanurejo dan sekitarnya dan dapat dijadikan suatu konsep di dalam Pendidikan Luar Sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata untuk mengurangi kemiskinan yang ada.

1.4.2.2 Bagi Pengelola Pariwisata

- 1.4.2.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri serta mengetahui bagaimana cara melakukan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri.
- 1.4.2.2.2 Memberikan kontribusi positif bagi pengelola pariwisata,
 pemerintah daerah maupun masyarakat dalam upaya
 pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.
- 1.4.2.2.3 Bahan masukan bagi lembaga swadaya masyarakat maupun swasta yang ingin turut serta membangun desa melalui desa wisata.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat Umum

1.4.2.3.1 Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dan bahan pertimbangan bagi pembangunan desa wisata untuk mencapai desa yang mandiri.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGI

1.4.2.3.2 Dapat memberi manfaat dan gambaran bagi masyarakat mengenai strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui desa wisata.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksdukan agar langkah selanjutnya tidak menyimpang dari obyek penelitian. Pada kesempatan ini penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian sebagi berikut:

1.5.1 Strategi

Strategi diartikan sebagai suatu rencana yang disatukan yang menghubungkan keunggulan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal atau dengan kata lain strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud strategi adalah proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata mandiri yang dilaksanakan di desa wisata wanurejo.

1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "Daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Masyarakat merupakan sekumpulan individu sosial yang saling berinteraksi dan mendiami suatu tempat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pemberian kekuatan atau daya oleh unsur masyarakat yang telah berdaya kepada masyarakat yang lainnya yang belum berdaya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat lebih mandiri nantinya.

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah semua kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya melalui program desa wisata mandiri di Desa Wanurejo.

1.5.3 Desa Wisata Mandiri

Desa wisata yang dimaksud yaitu suatu kawasan pedesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitekstur bagunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan pada berbagai komponen pariwisata. Dari potensi yang dimiliki tersebut, dapat dikembangkan untuk kemudian digunakan untuk mencukui kehidupan masyarakatnya.

Desa wisata mandiri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu desa Wanurejo dengan berbagai potensi alam dan sumber daya lainnya yang dikemas dalam nuansa alami pedesaan yang hijau dengan bentangan sawah yang luas dengan latar belakang serangkaian deretang pegunungan menoreh.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Pendidikan Nonformal Dalam Pemberdayaan

2.1.1 Pendidikan Sebagai Sarana Pemberdayaan

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranan-nya dimasa yang akan datang. Peranan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai indivi<mark>du maupun sebagai</mark> an<mark>ggota masyara</mark>kat, merupakan keluaran (output) dari sistem dan fungsi pendidikan. Pada hakekatnya pendidikan berfungsi utuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia baik individu maupun sosial. Dengan kata lain pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa Dalam pendidikan pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar depan. mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Dengan demikian diharapkan akan terjadi proses interaksi dalam wujud dialog dan komunikasi informasi antara sesama anggota masyarakat yang saling mendorong guna mencapai pemenuhan kebutuhan hidup manusia, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik sampe dengan aktualisasi diri (Maslow, 1984 dalam buku Prijonodan Pranaka, 1996)

2.1.2 Pengertian Pendidikan Nonformal

Kegiatan pendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yang berbunyi "jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya". Salah satu jalur pendidikan tersebut yaitu Pendidikan Nonformal, yang mempunyai pengertian Pendidikan Nonformal adalah pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Dalam buku karangan Munib dkk (2010: 147) tertuang bahwa Pasal 26 (3) pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang karena sesuatu tidak dapat mengikuti pendidikan formal disekolah (Sutarto, 2007:9). Program yang diselenggarakan melalui pendidikan nonformal dimaksudkan untuk melayani berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang karena suatu hal tidak memperoleh kesempatan belajar disekolah formal (Coombs, 1975). Pengertian ini mengindikasikan bahwa pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar yang berlangsung di luar sistem persekolahan, sumber belajar maupun warga belajar memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan belajar. Jadi pendidikan nonformal dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja

tanpa mengenal batasan usia dengan memanfaatkan lingkungan yang ada disekitarnya baik lingkungan sosial ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka kegiatan dan program pendidikan nonformal adalah kegiatan untuk memanusiakan manusia. Peserta didik diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya agar dapat memperoleh kesadaran dalam tingkat yang optimal, sehingga pada akhirnya dapat menyatakan dirinya dan memanfaatkan lingkungannya dengan penuh tanggung jawab.

Pendidikan nonformal berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berarti bahwa keseluruhan program pendidikan nonformal mengarah kepada upaya dan kegiatan pengembangan kualitas manusia indonesia agar memiliki pribadi, pekerjaann, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang terpuji, meiliki nalar, budi dan gerak yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, manusia yang mampu mengadakan hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitarnya. Program pendidikan nnonformal yang terdapat dimasyarakat cukup beraneka ragam. Ada program yang bersifat informasional yang bermaksud menyampaikan informasi, ada program instutusional yang bermaksud mengembangkan ketrampilan individu, dan ada pula program develompmental yang bermaksud membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan (Sutarto, 2007: 15-16)

2.1.3 Tujuan Pendidikan Nonformal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 bahwa pendidikan nonformal memiliki tujuan sebagai berikut:

- 2.1.3.1 melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
- 2.1.3.2 membina warga masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikapmental yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya bekerja mencari nafkah dan melanjutkan ke tingkat tinggi atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 2.1.3.3 memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal.

Melihat tujuan dari pendidikan nonformal menunjukkan bahwa tujuan ini mengarah kepada individu atau warga belajar dalam mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seperti yang tertuang dalam buku Sutarto (2007:46) pendidikan nonformal harus mampu mengaktualisasikan setiap potensi warga masyarakat untuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan sikapnya di dalam upaya meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pengembangan desa wisata sebagai wadah dalam membangun kesadaran masyarakat dalam berfikir kritis dan kreatif terhadap lingkungannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

2.1.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "empowerment" yang berarti "pemberian kekuasaan" karena power bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga

"mempunyai kuasa". Pemberdayan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat agar lebih mandiri dan dapat maningkatkan taraf hidupnya.

Chambers (Kartasasmita, 1996:142) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilainilai sosial yakni bersifat people-centered, participatory, empowering and sustainable. Pengertian lain yang disampaikan oleh Tjokrowinoto (Kusnadi, 2006: 219) konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (basic need) akan tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety need*). Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara mandiri memiliki ketrampilan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Berbeda dengan pendapat Pranarka (Ambar Teguh, 2004:78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukan "kekuasaan" daripada " pemberdayaan" itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah "*energize*" atau katakan memberi "energi" pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki keduduknnya dimasyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masay<mark>arakat yang berdaya.</mark> Ma<mark>syarakat yang berday</mark>a adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (civil society), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang <mark>lebih baik serta ma</mark>sya<mark>rakat yang menyad</mark>ari akan hak-hak dan kewajibannya dalam hid<mark>up ber</mark>masyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya (Tila'ar, 1997: 231). Menurut Chambers (Jamaludin, 2015:245) pemberdayaan juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (1) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG memnuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (frrdom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat. Melainkan bebas dari kesakitan. Kebebasan yéang dimaksud dapat diciptakan kelompok itu sendiri atau melalui fasilitasi pemerintah; (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannyadan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; (3) berpartisipasi dalam proses

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Jadi, pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

2.1.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik sesuai dengan profesi dan keterampilan masing-masing individu sehingga memiliki bekal kemampuan untuk bekerja dan berusaha mandiri dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Pendapat lain menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya (Sutarto, 2007: 153).

Pendapat lain tenta<mark>ng tuju</mark>an dari pemb<mark>erdaya</mark>an masyarakat adalah sebagai berikut (Jamaludin, 2015:248-249) :

- a) Membantu percepatan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti air bersih, listrik, perumahan, jalan, dan usaha ekonomi produktif.
- b) Mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

- c) Mendorong dan meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat lokal, seperti DPD, PKK, KUD, karang taruna, untuk aktif secara fungsional dalam proses pembangunan masyarakat desa.
- d) Mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, sebagai alternatif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dan menjaga stabilitas pembangunan.
- e) Mengembangkan jaringan kerja antar lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerjasama dan keterpaduan antarprogram pemenuhan kebutuhan dasar, program pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan program peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f) Mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan nonformal perlu mendapat prioritas, memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri". Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

2.1.6 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa pendekatan yang perlu dipergunakan dalam pendidikan non formal yang menekankan pada proses pemberdayaan antara lain yang dikemukakan oleh Kindervatter dalam Kusnadi (2007: 222) terdiri atas:

- 1. Community organization, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Hal yang perlu diperhatikan antara lain (a). Peranan partisipan ikut terlibat dalam kepengurusan atau tugas kelompok; (b) peranan tutor hanya sebagai perantara, pembimbing dan motivator serta fasilitator; (c) metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar
- 2. Participatory approaches, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin, tokoh masyarakat serta tenaga-tenaga ahli setempat
- 3. Education for justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta.

LIND/ERSITAS NEGERI SEMARANG

Sedangkan menurut Sudjana (2000), agar pendidikan nonformal dapat memberdayakan masyarakat maka harus didasarkan pada lima strategi dasar yaitu:

1) pendekatan kemanusiaan (humanistic approach), masyaraka dipandang sebagai subjek pembangunan dan masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang sedemikian rupa ditumbuhkan agar mampu membangun dirinya, 2) pendekatan partisipatif (participatory approach), mengandung arti bahwa masyarakat,

lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, 3) pendekatan kolaboratif (collaborative approach), dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kerjasama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi, 4) pendekatan berkelanjutan (continuing approach), yaitu pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan dan untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat menjadi hal yang paling pokok, dan 5) pendekatan budaya (cultural approach), penghargaan budaya dan kebisaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan.

Kamil (2011:55) menjelaskan empat karakteristik dasar dalam proses pemberdayaan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan nonformal, karakteristik tersebut meliputi :

1) Pengorganisasi Masyarakat, ialah karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka.

Pencapaian tujuan tersebut kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat diorganisir semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan dan kerja keras untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian masyarakat, antara lain : (a) peranan partisipasi ikut terlibat dalam kepengurusan atau tugas kelompok, disamping memanfaatkan warga setempat sebagai pemimpin. (b) peranan fasilitator adalah sebagai perantara atau penganjur, (c) metode dalam proses,

mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar, diskusi dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil secara demokratis, dan penentuan materi kegiatan berdasarkan hal-hal yang ada didalam masyarakat.

- 2) Kolaborasi dan pengelolaan diri, yaitu pendekatan dengan sistem penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam hubungan kerja atau kegiatan. Karena itu perlu ada stuktur organisasi yang mendukung dan memperkecil adanya perbedaan pembagian peranan.
- Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota (warga belajar) dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin srta tenaga-tenaga ahli setempat.
- 4) Pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga belajar tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan.

Agar situasi tersebut dapat terwujud peranan agen adalah mengajukan pemasalahan, merangsang adanya pertanyaan dan menciptakan suasuana kebebasan yang bertanggung jawab.

2.1.7 Kontribusi Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Masayarakat

LIND/ERSITAS NEGERLSEMARANG

Pendidikan nonformal tidak lepas kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat terutama dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Coombs,Prosser dan Ahmed (1973, 1974) yang tertuang dalam buku karangan Rifa'i (2008, hal:33) menyampaikan PNF sebagai suatu strategi bagi pembangunan pedesaan. Coombs juga menyatakan pembangunan pedesaan sebagai: bersamaan dengan

meningkatnya produksi dan pendapatan, distribusi pendapatan yang adil, meningkatnya tenaga kerja, kesehatan nutrisi dan perumahan yang lebih baik bagi semua penduduk pedesaan, memperluas kesempatan pendidikan bagi semua orang, memperkuat makna kerjasama dan pengaturan diri masyarakat lokal, dan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan keadilan sosial. Pada umumnya Pendidikan Nonformal sebagai pemberdayaan merupakan pendekatan pendidikan yang memungkinkan warga belajar memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi dan/atau politik yang lebih besar melalui: a) pelatihan pengendalian seluruh aspek proses belajar, b) belajar proses ketrampilan proses dan isi yang responsif dengan kebutuhan dan masalah, c) bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah.

pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupaka<mark>n sebuah</mark> upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.. Dalam kaitannya LIND/ERSITAS NEGERI SEMARANG dengan hal ini, menurut Yunus (2004: 3) ada lima prinsip dasar yang patut diperhatikan: keperdulian (1) terhadap masalah, kebutuhan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

Program pendidikan nonformal yang dibutuhkan masyarakat, terutama di era globalisasi ini, seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Dilihat dari maksud dan tujuannya, maka program pendidikan nonformal lebih mengutamakan pada pemberian pendidikan ketrampilan yang bersifat fungsional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini juga mengajarkan bagaimana orang mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya, mampu menyesuaikan diri dan menguasai lingkungannya, kemudian mampu memanfaatkan lingkungannya secara seimbang dan serasi (Sutarto, 2007 : 58).

Dijelaskan pula dalam konteks pembangunan nasional yang meliputi pembangunan dalam se<mark>mua as</mark>pek kehidupan dengan titik berat pada sektor ekonomi, maka pendidikan nonformal menggarap program-program pendiidkan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lapangan kerja, wirausaha dan sektor pembangunan umumnya. Pendidikan nonformal berkontribusi besar LINIVERSITAS NEGERI SEMARANG dalam menyiapkan sumberdaya manusia mandiri dan mampu vang mengaktualisasikan dirinya dan lingkungannya dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada untuk dijadikan sebuah peluang guna menopang hidupnya. Sejalan dengan yang dikemukakan Coombs, Harbinson (1973) dalam buku karangan Sutarto (2007, hal: 157) menyatakan bahwa pendidikan nonformal mengemban berbagai fungsi, yaitu : (1) meningkatkan kemampuan kerja bagi

mereka yang telah mempunyai pekerjaan, (2) untuk mempersiapkan angkatan kerja terutama para generasi muda yang akan memasuki lapangan kerja, dan (3) untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tentang dunia kerja.

Sudjana dalam buku karangan Kamil (2011 : 54) secara lebih tegas menerangkan tugas pendidikan nonformal adalah : (a) membelajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan ketrampilan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi pemungkinan perubahan di masa depan, dan (b) membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidupnya.

Pendidikan nonformal dalam pemberdayaan mengandung arti luas yakni mencakup meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan pengembangan kemampuan lainnya kearah kemandirian hidup. Kindervatter (1979) dalam Kamil (2011 : 54-55) menjelaskan bahwa peran pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan didalamnya meliputi peningkatan dan perubahan sumberdaya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya.

LINIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

2.2 Pemberdayaan Desa Wisata

2.2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara Nasional. UU Desa mengembangkan prinsip keberagaman, mengedeapankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu UU Desa mengangkat hak dan kedaulatan desa yang terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional (Kurniawan, 2015: 9).

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah memawa dampak yang positif dalam meningkatkan kemandirian masing-masing daerah untuk mengelola segala potensi yang ada dengan kewenangan penuh. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, karena pada dasarnaya pemerintah daerah lebih mengetahui lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari daerahnya tersebut. Usman (1998:12-13) menyatakan bahwa masing-masing daerah perlu diberi kesempatan menumbuhkembangkan kepentingan dan cita-citanya sendiri misalnya dalam LIND/ERSITAS NEGERL SEMARANG pengembangan pariwisata. Namun demikian, pencanangan cita-cita semacam itu harus didasarkan pada latar belakang historis, letak georafis, dan potensi perkembangannya sehubunan dengan faktor-faktor penunjang yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk membangun daerah yang mandiri sehingga diharapkan nantinya daerah tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Salah satunya yaitu melalui pembangunan masyarakat desa seperti yang

tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan tujuannya adalah sebagai berikut :

- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI
- 2. Memberikan kejelasa status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- 4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan aset desa untuk pengembangan potensi dan aset guna kesejahteraan bersama
- 5. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab
- 6. Meningkatkan pela<mark>ya</mark>nan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- 7. Meningkatkan ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- 8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- 9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan dalam UU desa. Perubahan pada hakekatnya memang tidak mudah tetapi juga tidak terlalu sulit. Maka dari itu pemerintah berbagai program untuk mendorong pembangunan desa melalui

pemberdayaan masyarakat desa. Mskipun konsep pemberdayaan masyarakat mlalui bidang pariwisata di indonesia baru brkmbang, Parikesit dalam penelitian Ika Kusuma (2011) menjelaskan beberapa isu strategis dalam pengembangan pariwisata bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai berikut:

Pertama, pentingnya dukungan peran serta dan inisiatif masyarakat. Dalam hal ini pengembangan pariisata memerlukan peran serta dan inisiatif masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi obyek wisata. Peran aktif masyarakat tersebut khususnya untuk membantu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi terelenggaranya kegiatan wisata, dalam hal ini masyarakat sekitar diharapkan dapat menjadi tuan rumah (host) yang baik, maupun turut aktif sebagai pelaku pariwisata yang simpatik (penyedia jasa-jasa yang diperlukan tamu/wisatawan, antara lain makan minum, akomodasi, transportasi dan sebagainya) serta sekaligus sebagai wisatawan.

Kedua, area keterlibatan masyarakat lokal. Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengebangan pariwisata, terdapat 3 (tiga) area yang memungkinkan masyarakat dapat terlibat dalam proses pengembangan, yaitu: (1) tahap perencanaan (planning stage); (2) implementasi atau pelaksanaan (implementation stage); (3) serta dalam hal mendapatan manfaat atau keuntungan (share benefits) baik secara ekonomi maupn sosial budaya.

2.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk

menikati hasil pembangunan. Karena tidak dipungkiri bahwa terjadinya pembangunan adalah karena adanya manusia. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wijayanti (2011. Vol 12 No. 1) keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus dan komperhensif untuk mencapai keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat sangat perlu untuk dilakukan karena mampu melihat permasalahan yang terjadi diwilayah tertentu, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan wilayah sekitar. Dalam buku karangan Jamaludin (2015:250) menyebutkan berbagai bentuk atau program kegiatan pemberdayaan diantaranya:

a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (bargaining position) yang diperintah terhadap pemerintah. Bargaining ini dimaksudkan agar pemerintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak-pihak lain. Birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah memiliki kualitas kehidupan kerja (quality of work life) yang tinggi dan berorientasi kepada : (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan (participation in decision program), (2)

program pengembangan karir (career development program), (3) gaya kepemimpinan (leadership style), (4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (the degrees of stress experienced by employees), dan (5) budaya organisasi (the culture of the organisastion)

- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan pelaku yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan merupakan langkah awal bagi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dimana masyarakat bisa memiliki kekuatan, kemampuan serta menguasai suatu kemampuan serta menguasai sesuatu yang mampu memberdayakan kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, seringkali pemberdayaan erat sekali kaitannya dengan pembangunan. Secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan berikut.

Bantuan modal. Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungkungannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan.

Bantuan pembangunan prasarana. Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, perlu adanya sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana ditengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktivitasnya.

Bantuan pendampingan. Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

Kelembagaan. Keberadaan sebuah lembaga organisasi di tengah masyarakat merupakan salah satu aspek untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah dan sebagainya.

Keempat kegiatab pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat, yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri. Oleh karena itu, usaha memberdayakan massyarakat khusunya di

pedesaan serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi snagat kompleks. Pembangunan fenomena semakin pedesaan dalam yang perkembangannya perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, upaya dengan kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Menurut Usman (1998:31) perencanaan dan implementasi pembangunan berisi usaha untuk memberdayak<mark>an masyarakat sehing</mark>ga mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Dengan melihat latar belakang suatu daerah maka pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada didalam masyarakat setempat.

2.2.3 Pengembangan Desa Wisata

Menurut Perdes No 5 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan

LIND/ERSITAS NEGERLSEMARANG

kebutuhan masyarakat dan sebesar besarnya keseahteraan rakyat. Dari sudut pandang sosiologi menurut Usman (1998:53) kegitan pariwisata sekurangkurangnya mencakup tiga dimensi interaksi, yaitu: kultural, politik dan bisnis. Dalam dimensi interaksi kultural, kegiatan pariwisata memberi ajang akulturasi budaya berbagai macam etnis dan bangsa. Melalui pariwisata kebudayaan masyarakat tradisional agraris bertemu dan terpadu dengan kebudayaan masyarakat modern industrial. Kebudayaan-kebudayaan itu saling menyapa, saling bersentuhan, saling beradaptasi dan tidak jarang kemudian menciptakan produk-produk budaya baru. Dalam dimensi politik, kegiatan pariwista dapat menciptakan dua kemungkinan ekstrem, yaitu : 1) persahabatan antarentis dan antarbangsa, dan 2) bentuk-bentuk penindasan, ekploitasi atau neokoloisme. Di satu pihak, melalui pariwisata, masing-masing etnis dan bangsa dapat mengetahui atau mengenal tabiat, kemauan dan kepentingan etnis dan bangsa lain. Tetapi di lain pihak, melalui pariwisata pula, dapat tercipta bentuk ketergantungan suatu etnis atau bangsa kepada etnis dan bangsa lain. Sedangkan dalam dimensi interaksi bisnis, kegiatan pariwisata terlihat menawarkan bertemunya unit-unit usaha yang menyajikan bermacam-macam keperluan wisatawan. Bentuk yang LIND/ERSITAS NEGERI SEMARANG disajikan oleh unit-unit usaha ini dapat berupa barang dan jasayang rentangannya dapat berskala lokal, nasional dan internasional.

Pada hakikatnya pengembangan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup disekitarnya (Perdes No 5 tahun 2014).
Pengembangan desa wisata tersebut meliputi pembangunan:

- 1. industri pariwisata
- 2. destinasi pariwisata
- 3. kelembagaan kepariwisataan
- 4. promosi dan pemasaran

Pembangunan desa masih sering menganut konsep "membangun desa" dan bukan "desa membangun". Pada konsep membangun desa, faktor ekternal lebih berperan menentukan arah pembangunan desa dan ini menyebabkan desa semakin tergantung pada bantuan luar. Tetapi sebaliknya pada konsep desa membangun peran masyar<mark>akat justru menjadi faktor utama guna mem</mark>bangun desa yang berketahanan. Dalam konteks pariwisata, pembangunan bersama masyarakat mengarah pada bentuk pariwisata yang berkaitan dengan kepentingan jangka panjang masyarakat itu sendiri. Seperti yang tertuang dalam Perdes No 5 tahun 2014 yang menyatakan pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal, dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang LIND/ERSITAS NEGERL SEMARANG terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya, demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat, karena masyarakat lokal yang akan membangun dan mengelola fasilitas wisata, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat ekonomi secara langsung.

Sastrayuda (2010) Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut: (1) memanfaatkan sarana dan prasaran masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan (5) menetapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

2.2.4 Definisi Desa Wisata

Menurut Perdes No 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Desa Wisata pasal 1 menyatakan bahwa desa wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistim serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Menurut Totok Mardikanto, dkk (2015) dalam Buku Pedoman Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitekstur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan pada berbagai komponen kepariwisataan.

UU No 10 tahun 2009 menyatakan desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya

tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Secara garis besar desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan kemampuan unsr-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan adat keseharian yang memiliki ciri khas arsitekstur serta tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktifitas pariwisata.

Pada dasarnya desa wisata lebih menonjolkan kearifan lokal dan budaya setempat. Disamping itu pengelolaanya juga langsung dari masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi alam, sosial, ekonomi, budaya, sejarah maupun tata ruang yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan dari desa wisata itu sendiri yaitu menggali potensi desa, memperluas lapangan kerja, ruralisasi, menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya, dan memperkokoh persatuan bangsa. Pembentukan desa wisata biasanya dikarenakan desa tersebut mempunyai ciri khas, daya tarik yang mampu dikomersilkan. Daya tarik wisata merupakan segala LINDVERSITAS NEGERESEMARANG memiliki keunikan, keindahan dan nilai sesuatu yang yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusai yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan berbagai daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah, maka secara tidak langsung pengembangan desa wisata ini sekaligus sebagai wadah untuk melestarikan seni dan budaya yang ada

dalam masyarakat tersebut sekaligus pembangunan pariwisata berbasi masyarakat yang edukatif dan kreatif.

Dengan demikian perlu adanya strategi yang digunakan dalam pengembangan desa wisata agar dapat menarik para wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut Totok Mardikanto, dkk (2015 : 12) strategi dalam program desa wisata adalah :

- a. Mengintegrasikan potensi dan atraksi wisata di desa wista
- b. Meningkatkan manajemen pengelolaan atraksi wisata/budaya peninggalan sejarah di lingkup desa wisata dan keterpaduan pengembangan dengan potensi pendukung budaya pedesaan
- c. Memperkenalkan desa dengan keunikan produk-produk seni dan budayanya
- d. Mengembangkan sadar wisata untuk mendorong tanggungjawab dan peran serta masyarakat dan industri dalam usaha pariwisata.

Dalam tingkat perkembangannya, desa wisata dibedakan menjadi tiga kategori, diantaranya adalah :

- 1) Desa wisata embrio merupakan desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat/desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata
- 2) Desa wistaa berkembang yaitu desa wisata embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah dalam swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaanya, sudah mulai melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung

3) Desa wisata maju merupakan desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelila, serta mampu melakukan proosi dan pemasaran dengan baik.

2.2.5 Pemberdayaan Desa Wisata

Pembangunan desa wisata merupakan salah satu perwujudan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Desa mandiri yang dimaksudkan disini yaitu desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya tersebut. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya UU Desa dimana kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Selain itu dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desadesanya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pedesaan terus berupaya untuk menawarkan alternatif teori yang lebih mengarah pada kebijaksanaan pembangunan pedesaan yang lebih manusiawi.

Salah satu alternatif dalam pembangunan desa tersebut adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut diharapkan mampu memiliki manfaat seperti yang dijelaskan oleh Sastrayuda (2010) yaitu:

2.5.5.1 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Desa wisata perlu dukungan melalui kelancaran dan efektifitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi (UMKK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar masyarakat desa

mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara: (1) usaha ekonomi rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi) yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari, (2) dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdapingan, kemitraan dengan koperasi, (3) pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan produkproduk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat.

Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti, prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda

2.5.5.2 Pemberdayaan Sosial Budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari peerintah daerah, sebagai reguler dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah kependudukan, perbaikan dalam pelayanan masyarakat. Unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung

menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat.

Pentingnya kajian sosiologi terhadap penerapan permodelan pariwisata semakin jelas, karena tipe pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata, dimana desa mempunyai beberapa ciri, seperti : desa wisata melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih intensif karena dasarnya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisata melekat pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi dampak terhadap sosia budaya pariwisata yang menurut Fiquerola terdapat dari enam kategori, yaitu :

- 1) Dampak ter<mark>hadap struktur demog</mark>rafi
- 2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian
- 3) Dampak terhadap transportasi nilai
- 4) Dampak terhadap gaya hidup tradisional
- 5) Dampak terhadap pola konsumsi, dan
- Dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial budaya pariwisata.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5.5.3 Pemberdayaan Lingkungan Desa Wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Budiharsono (2006:10) mengemukakan dimensi ekonomi antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial

bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah ke pendudukan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain.

2.3 Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan atau mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang" adalah :

Penelitian tentang pemberdayaan ini pernah dilakukan oleh Abdur Rohim dalam sekripsinya yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidu, DIY)".

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata mendapat dukungan dan respon yang baik dari pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata salah satunya ditunjukkan dengan bantuan modal melalui Program PNPM Mandiri Pariwisata. Selain itu pemberdayaan melalui desa wisata tersebut juga berdampak pada berbagai bidang seperti peningkatan pendapatan ekonomi, serta penciptaan lapangan peerjaan baru. Dampak lain di yang ditunjukkan dalam bidang sosial-budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, serta pelestarian kebudayaan lokal berupa pelestarian seni wayang beber yang sudah langka ditemukan di Jawa.

Selain itu penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata juga pernah dilakukan oleh Ika Kusuma Permatasai dalam Tesisnya yang berjudul

"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah)"

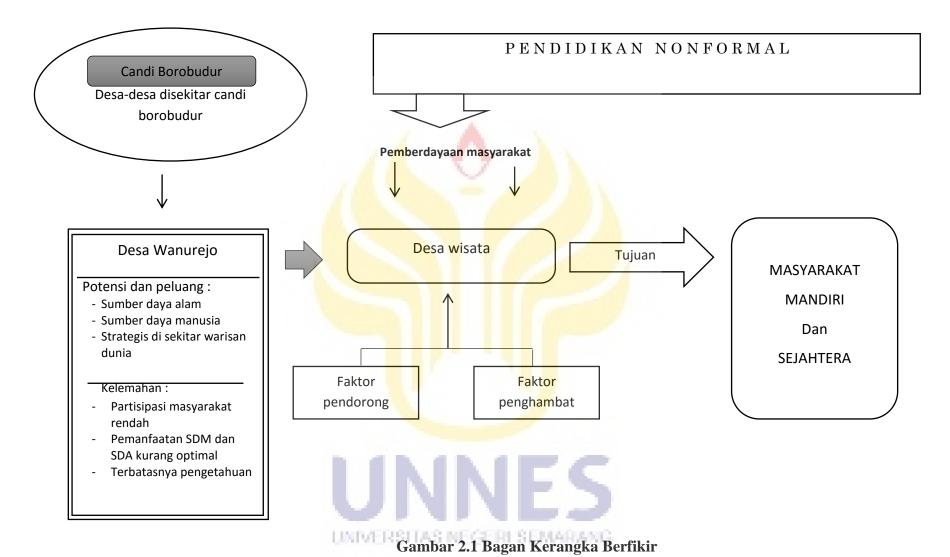
Hasil penelitian menjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mampu menarik banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri karena lokasinya yang dekat dengan candi borobudur. Manfaat yang diperoleh penduduk dengan adanya desa wisata selain tambahan pendapatan, juga lingkungan mereka yang menjadi bersih dan teratur. Selain itu penduduk juga memperoleh banyak pengalaman berinteraksi dengan wisatawan yang datang secara langsung.

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disusun, maka dapat diambil pokokpokok pikiran sebagai berikut: "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa
Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang"
ada beberapa yang harus diamati yaitu peran serta pendidikan nonformal dalam
pembangunan desa umtuk memperoleh kesejahteraan yang salah satunya melalui
program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang mengacu
pada bagaiamana masyarakat setempat memiliki pengaruh yang besar baik secara
sosial maupun organisasi kemasyarakatan sehingga mampu mempengaruhi
lingkungan hidup disekitar mereka. Masyarakat dituntut untuk dapat berfikir aktif
dan kreatif terhadap lingkungan yang ada untuk dimanfaatkan sebagai peluang
yang mampu menghasilkan keuntungan, karena desa Wanurejo yang berada di
dekat situs warisan dunia Candi Borobudur menjadi salah satu keuntungan yang
besar.

Pemberdayaan melalui desa wisata diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya dalam bidang ekonomi. Selain keuntungan ekonomi masyarakat setempat juga dapat sekaligus menjaga dan mempertahankan budaya lokal sealigus melestarikan alam disekitar mereka, karena hal tersebut yang menjadi modal utama sekaligus menjadi ciri khas dalam menciptakan desa wisata yang lebih menarik. Meskipun kondisi saat ini Desa Wanurejo telah ditetapkan sebagai desa mandiri oleh Gubernur Jawa Tengah tetapi tidak menutup kemunginan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tersebut tidak menemui kendala dan permasalahan.

Pemberdayaan juga masih dalam proses yang sedang berjalan, masih terdapat masyarakat yang miskin, pengangguran dan pemerataan pendapatan juga belum tercapai. Dengan demikian perlu adanya strategi atau cara yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program desa wisata tersebut. Pengelolaan dan strategi yang dilaksanakan melalui program desa wisata tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan lingkungan sekitar dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan mandiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri yang dijelaskan secara deskriptif diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri yang ada di Desa Wanurejo dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pelatihan, promosi dan kerjasama, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada mulai dari sumber daya masyarakat maupun sumber daya alam yang menonjolkan pada aspek seni dan budaya sebagai ciri khas desa tersebut.
- 2. Faktor pendorong dari strategi pemberdayaan masyarakat yaitu lokasi desa wanurejo yang dekat dengan kawasan wisata Candi Borobudur, kelompok pelaku seni yang masih aktif mempertahankan budaya tradisional, dan tingkat kesadaran masyarakat akan kemajuan pembangunan tinggi, sedangkan faktor peghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wisata Wanurejo yaitu mafia pariwisata semakin menjamur, munculnya sifat egosentris atau individualisme masyarakat, fasilitas pelaku wisata yang terbatas serta Borobudur masih menjadi rute perjalanan pariwisata Jogja.

5.2 Saran

Dari rumusan masalah dan hasil penelitian, maka saya dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa

Penataan dan tata ruang dalam lingkup desa wisata hendaknya lebih diperbaiki supaya terlihat lebih asri dan indah tanpa meninggalkan konsep tradisonal yang menjadi daya tarik dan ciri khas dari desa wisata Wanurejo. Hal ini tentu akan membuat wisatawan yang berkunjung menjadi nyaman dan puas sehingga harapan pengelola desa wisata Wanurejo untuk membuat wisatawan lebih lama tinggal didesa akan tercapai.

2. Bagi Pengelola Pariwisata

- a. Pengelola pariwisata desa atau Bapardes hendaknya lebih bijak untuk menyikapi kondisi yang terjadi dilingkup desa wisata, untuk mempertegas kebijakan dari pelaksanaan program desa wista sesuai yang telah direncanakan untuk mencegah timbulnya mafia-mafia pariwisata yang semakin merajalela.
- b. Diharapkan kerjasama yang terjalin dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata akan mendukung dalam pengadaan akomodasi maupun perlengkapan sarana prasarana yang ada sehingga akan memperlancar kegiatan pariwisata desa.

LIND/ERSITAS NEGERESEMARANG.

c. Diharapkan pemerintah dan pengelola mengadakan rute perjalanan pariwisata Candi Borobudur secara mandiri agar desa-desa

disekitarnya ikut merasakan dampak dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

3. Bagi Masyarakat Umum

Selain itu partisipasi aktif masyarakat serta kesadaran akan rasa memiliki desa wisata lebih ditingkatkan agar masyraakat juga turut andil dalam pengelolaan sehingga akan mempersempit ruang bagi munculnya mafia pariwisata karena masyarakatnya bersatu padu. Hal ini juga akan menghilangkan timbulnya sifat egosentris masyarakat untuk memperoleh keuntungan sendiri. Sebagai masyarakat yang cerdas, hendaknya lebih bijak dalam menyikapi kondisi dan situasi yang ada disekitar demi kenyamanan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Manajemen penelitian. Jakarta: PYT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Jawa Tengah Dalam Angka* 2015. http://jateng.bps.go.id/website/pdf publikasi/Statistik-Daerah-Jawa-Tengah-2015, diakses Januari 2017.
- Eko, Sutoro. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU

 Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
 dan Transmigrasi Republik Indonesi.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif &Kualitatif.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hiryanto, 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/pemberdayaan-masyakat-pnf. Diakses Januari 2017.
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat : Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung : Humanlora.
- Permatasari, Ika Kusuma. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah)
- Jamaludin. 2015. "Sosiologi Pedesaan". Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Kamil, Mustofa. 2007. Model *Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi*).

 Bandung: CV Alfabeta
- ______. 2011. Pendidikan Nonformal : Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Komikan Jepang). Bandung : Alfabeta.

- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesi.
- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesi.
- Kusnadi, dkk. 2005. *Pendidikan Keaksaraan, Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Diretorat Pendidikan Masyarakat.
- Mardikanto, dkk. 2014. Buku Pedoman Rintisan Model Desa Berdikari Profinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munib, dkk. 2010. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2013. Model Pemberdaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Di Dusun Kalingiwo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi. Hal. 26-36, Vol. 4, No. 1.
- Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Permen Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Desa Wisata
- Pridjono & Pranaka, 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta : Centre Of Strategic And International Studies.
- Rifa'i, Achmad. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. Semarang : UNNES Press.
- ______, 2011. Psikologi Belajar Orang Dewasa. Semarang : UNNES PRESS

- Rohim, Abdul. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY).
- Sastrayuda, Gumelar S. 2010. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata.

 http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEM_BANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA. Diakses Januari 2017.
- Satori & Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sopandi, Andi. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi
 Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di
 Kabupaten Bekasi.

 Jurnal Kybernan. Hal 41-52, Vol. 1, No. 1
- Sugiyono. 201<mark>6. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods). Band</mark>ung: Alfabeta
- Sutarto, Joko. 2007. Pendidikan Nonformal Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat. Semarang: UNNES Press.
- ______, 2017. Determinant Factors of The Effecticess Learning Process and Learning Output of Equivalent Education. Volume 88, Hal 90-95.

Tilaar H.A.R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka cipta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Victoria, dkk. Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau. Jakarta:

 Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaga Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

 http://sregip.or.id/main/wp-content/uploads/2016/03/Buku_Panduan_Pengembangan_Desa_Wisata_Hijau.diakses_Januari_2017
- Wahab, Salah. 1989. Manajemen kepariwisataan. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Widiputranti, dkk. 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta : APMD Press Yogyakarta.
- Wijayanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 12. No 1, Hal 15-27
- Yunus, Firdaus. (2004). Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire & YB

 Mangun Wijaya. Yogyakarta: Logung Pustaka.

